



EDISI JUMAT 07 AGUSTUS 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

02

GOVERNMENTTODAY

Kegelisahan Prabowo: Piala Dunia Gagal hingga Skor PISA

05

NUSANTARA

Kasus Cibiran Pasien BPJS, 10 Nakes Diidentifikasi

10

LISTSTYLE

Riset Sebut Sebenarnya Cuma Butuh 23 Set Baju di Lemari

MISTERI 995 SENJATA DI BUNGKER SEKOLAH

Temuan di Yayasan Kawasan Jaksel, Polisi Juga Sita Narkoba

Di tengah aktivitas belajar mengajar yang masih berlangsung di sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, polisi mengusut penemuan 995 pucuk senjata. Sekolah yang menaungi jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA itu dikejutkan dengan fakta salah satu ruangnya menyimpan barang-barang berbahaya. Kasus ini bermula dari konflik internal yayasan. Pengurus memberhentikan mantan Ketua Yayasan Indra Wargadalem (IWD) pada 18 April 2026. Menurut pihak yayasan, sengketa kepengurusan membuat sejumlah ruang, termasuk ruang bawah tanah yang disebut menyerupai bunker, tetap terkunci. Pengurus baru kemudian membuka paksa salah satu kantor pada 10–11 Juli 2026. Dari lokasi itu, mereka mengaku menemukan ratusan barang yang diduga berupa senjata api dan air gun, lalu melaporkannya kepada polisi. Penyisiran berlanjut pada 5 Agustus 2026 dengan pendampingan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Petugas mengamankan laras berkaliber 5,56 milimeter, senjata genggam berkaliber .40 dan 9 milimeter, satu pucuk shotgun kaliber 12/70, magasin Glock berkapasitas 30 butir, magasin M4, serta sejumlah komponen persenjataan lainnya. Ada juga paket yang diduga sabu-sabu, dua linting yang diduga ganja, serta sekitar 25 keping VCD bermuatan pornografi. Seluruh barang tersebut kini masih menjalani identifikasi dan pemeriksaan forensik. **BACA HAL 11...**

ATURAN & SYARAT KEPEMILIKAN SENJATA API SIPIL DI INDONESIA

Sanksi Senpi Ilegal



Berdasarkan UU Darurat No. 12 Tahun 1951.



Ancaman: Pidana mati, seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun.

Dasar Hukum



UU Darurat No. 12/1951: Kepemilikan ilegal.



UU No. 8/1948: Pendaftaran & izin.



UU No. 2/2002: Kewenangan Polri.



Perpol No. 1/2022: Perizinan & pengawasan.

Yang Dapat Mengajukan

- Pejabat pemerintah.
- Pejabat eselon I–II.
- Hakim, jaksa, purnawirawan TNI/Polri.
- Direksi, komisaris, pengacara.
- Atlet menembak (PB Perbakin).

Syarat Pemohon

- Usia ≥21 tahun, KTP/KK, SKCK.
- Sehat jasmani dan tidak buta warna.
- Lulus uji psikologi resmi dari Polda
- Lulus uji kemahiran menembak.

Penampakan senjata api dan air soft gun yang ditemukan di salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan. (Dok.ist)

TREN ALOKASI ANGGARAN RISET INDONESIA (2022-2026)

2026

- Estimasi Nominal Anggaran:
Rp 12,0 T (Total) / ~Rp 6,14 T (BRIN)
- Rasio Terhadap PDB: ~0,34%

2025

- Estimasi Nominal Anggaran:
Rp 5,84 T (Pagu awal BRIN)
- Rasio Terhadap PDB: ~0,30%

2024

- Estimasi Nominal Anggaran:
Rp 6,70 T (Pagu sektor terkait)
- Rasio Terhadap PDB: ~0,28%

2023

- Estimasi Nominal Anggaran:
Rp 6,38 T (Dikelola BRIN) /
Total nasional ~Rp 9,5 Triliun
- Rasio Terhadap PDB: ~0,28%

2022

- Estimasi Nominal Anggaran:
Rp 10,0 T (Konsolidasi awal)
- Rasio Terhadap PDB: ~0,28%



Bagi Prabowo, dua persoalan itu bukan sekadar isu olahraga dan pendidikan. Keduanya menjadi cerminan daya saing Indonesia yang perlu segera dibenahi melalui pembelajaran, riset, dan introspeksi, alih-alih saling menyalahkan.

Prabowo mengaku terus terang merasa sedih Indonesia kembali gagal tampil di Piala Dunia 2026. Menurut dia, kegagalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama, bukan alasan untuk mencari pihak yang patut disalahkan.

"Tapi saya sangat sedih terus terang saja, ya kan, masalah sepak bola saja kita tidak mampu masuk Piala Dunia," kata Prabowo.

Ia kemudian membandingkan Indonesia dengan Cape Verde, salah satu negara yang berhasil mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Menurut Prabowo, negara kepulauan di Afrika Barat itu memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih kecil dibanding Indonesia.

"Masa negara kecil seperti Cape Verde masuk. Saya nggak tahu itu. Mungkin jumlah penduduknya dengan Kabupaten Sumedang, mungkin lebih banyak Sumedang.

KEGELISAHAN PRABOWO: PIALA DUNIA GAGAL HINGGA SKOR PISA

Presiden Prabowo Subianto melontarkan dua kegelisahan besar mengenai kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia saat bertemu dengan sekitar 150 periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/8/2026). Di hadapan para peneliti, Prabowo menyinggung kegagalan Timnas Indonesia menembus Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus capaian Programme for International Student Assessment (PISA) yang masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan.



Presiden Prabowo Subianto (tengah) melihat hasil inovasi BRIN dalam pembuatan genteng dengan material ramah lingkungan pada acara pameran hasil inovasi BRIN di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (6/8/2026). (BPMI Sekretariat Presiden)

Cape Verde masuk, apalagi banyak negara-negara kecil yang masuk ke situ," ujarnya.

Karena itu, Prabowo meminta seluruh pihak menghentikan kebiasaan mencari kambing hitam setiap kali Indonesia gagal mencapai target.

"Maksud saya begini, lihat fakta itu. Negara sebesar kita tidak bisa ikut Piala Dunia. Satu yang saya bilang, jangan mengeluh, jangan mencari kambing hitam. Jangan, karena itu tidak akan membantu," tuturnya.

Menurut Prabowo, langkah yang lebih penting ialah mempelajari alasan negara-negara yang lebih kecil justru mampu bersaing di level dunia.

"Nah sekarang belajar, bagaimana? Kenapa kok bisa negara itu masuk? Kenapa? Apa yang dilakukan? Pelatuhnya dari mana? Guru-gurunya dari mana?" katanya.

Pesan tersebut, menurut Prabowo, sejalan dengan pentingnya budaya belajar dan riset untuk meningkatkan kualitas bangsa.

Pendidikan Tertinggal

Selain sepak bola, Prabowo juga menyoroti capaian Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA), studi internasional yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains peserta didik.

Ia mengatakan skor literasi membaca Indonesia masih berada di bawah sejumlah negara tetangga.

"Jadi skor PISA membaca, skor kita tadi kalau Anda lihat di situ, hanya sedikit di atas Filipina. Kita masih di

bawah Thailand, di bawah Malaysia, di bawah Belanda, di bawah Vietnam, di bawah rata-rata OECD, di bawah Jepang, di bawah Singapura," ujar Prabowo.

Meski demikian, Prabowo menilai perbandingan dengan Singapura tidak sepenuhnya setara karena perbedaan skala wilayah dan jumlah penduduk.

"Kalau Singapura saya nggak terlalu, nggak usah kita terlalu khawatir kok. Hanya negara lima juta, satu kota," katanya.

Menurut dia, tantangan Indonesia jauh lebih kompleks dibanding negara-kota tersebut. Sistem pendidikan nasional harus melayani ratusan ribu sekolah yang tersebar di wilayah kepulauan.

"Kalau Menteri Pendidikan Singapura itu sebetulnya nggak bisa dibandingkan dengan Menteri Pendidikan Indonesia. Indonesia punya 388.000 sekolah kalau tidak salah, nanti dicek ya. Ada di tengah gunung, ada di pulau terluar. Jadi bagaimana memberi pendidikan yang terbaik untuk Indonesia," ujar Prabowo.

Besarnya tantangan geografis, kata Prabowo, memang menjadi kenyataan yang harus dihadapi. Namun, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menerima ketertinggalan.

"Now it's real, it's reality. Dia berhasil, tapi kesulitan kita sangat besar. Ini tidak boleh alasan bahwa kita menilai bahwa kita tidak perlu kejar ketertinggalan. Ini saya sampaikan, ini yang saya katakan realita," katanya.

Prabowo juga mengingatkan agar Indonesia bersikap objektif terhadap berbagai indikator internasional. Penilaian dari luar, menurut dia, patut diperhatikan, tetapi harus dipahami dalam konteks tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas.

"Ini orang luar lihat kita ya kita boleh kita terima, tapi kita jangan terlalu juga terlalu takut. Dia hanya lihat gambar dari luar, dia nggak lihat kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sebagai negara yang sangat besar," ujar Prabowo.

Riset Masih Minim

Selain menyoroti kegagalan Indonesia menembus Piala Dunia dan rendahnya capaian PISA, Prabowo juga mengungkap persoalan lain yang dinilai menjadi akar lemahnya daya saing nasional, yakni kecilnya investasi untuk riset dan pengembangan (research and development/R&D).

Di hadapan sekitar 150 peneliti BRIN, Prabowo mengakui belanja riset Indonesia masih jauh dari kebutuhan apabila ingin bersaing dengan negara-negara maju.

"Kita koreksi diri kita sebagai bangsa, investasi kita di bidang research and development sangat sedikit, jauh dari yang seharusnya," kata Prabowo.

Menurut dia, peningkatan kapasitas riset membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar. Pemerintah, kata Prabowo, akan mencari ruang fiskal untuk memperkuat pendanaan riset, salah satunya melalui efisiensi belanja negara dan penertiban berbagai praktik yang merugikan keuangan negara.

"Untuk itu tentunya kita perlu dana, dana itu kita cari. Dana itu dari mana? Dari penghematan hal-hal yang korup, praktik-praktik korupsi, praktik-praktik penipuan, fraud, ya, underinvoicing," ujarnya.

Dalam pertemuan yang sama, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria memaparkan arah pengembangan riset nasional yang disiapkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam dua hingga tiga dekade mendatang. (gus,rls,ant/dya)

MUI USUL HUKUMAN MATI KORUPTOR, DPR PILIH PERAMPASAN ASET

Usulan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar negara menerapkan hukuman mati bagi koruptor memantik perdebatan baru mengenai arah pemberantasan korupsi di Indonesia. Di tengah desakan agar negara memberi efek jera yang lebih keras kepada pelaku rasuah, mayoritas suara di Komisi III DPR justru menganggap prioritas utama bukanlah eksekusi mati, melainkan mengembalikan kerugian negara melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Pandangan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Menurut dia, hukuman mati tidak otomatis memulihkan kerugian keuangan negara yang telah digelapkan para koruptor.

"Kalau dihukum mati, uangnya enggak balik, maka itu RUU Perampasan Aset dibuat paten untuk bisa menghasilkan pemulihan aset negara," kata Sahroni, Kamis (6/8/2026).

Ia menilai keberadaan RUU Perampasan Aset akan memberikan instrumen hukum yang lebih efektif untuk menarik kembali aset hasil tindak pidana korupsi sekaligus memperkuat upaya pencegahan.

"RUU Perampasan Aset minimal bisa memulihkan aset-aset yang telah dikorupsi dan lembaga penegakan hukum juga lebih fokus mencegah dan menjaga para pejabat yang ada di republik ini agar semuanya tidak melakukan yang bisa mengakibatkan kerugian negara," ujarnya.

Di luar substansi hukuman, Sahroni juga meminta MUI tetap fokus menjalankan fungsi pembinaan umat. Ia berharap organisasi tersebut lebih banyak memperhatikan kesejahteraan ulama dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan keagamaan.

"Mending MUI fokus pada pelayanan ulama-ulama di Indonesia, diperhatikan kesehatannya, dan para ulama awasi pesantren-pesantren yang ada supaya menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan," katanya.

Penolakan terhadap pidana mati juga datang dari Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman. Politikus Partai Demokrat itu berpandangan bahwa akar persoalan korupsi tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperberat ancaman hukuman.

"Hukuman mati itu bukan solusi," kata Benny. Menurut dia, yang lebih mendesak ialah mengembalikan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (PKK) seperti sebelum revisi Undang-Undang KPK diberlakukan. Ia bahkan mengusulkan agar KPK kembali menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan menyelidiki dan menyidik perkara korupsi.

"Solusinya KPK harus benar-benar menjadi lembaga yang independen,



KPK menyita uang senilai sekitar US\$530.000 atau setara Rp9,5 miliar dalam dugaan suap pengurusan restitusi pajak di KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan.ist

caranya yaitu dengan mengembalikan posisi KPK seperti sebelum dilakukan revisi. Dan KPK sebaiknya menjadi satu-satunya lembaga yang diberi wewenang untuk berantas korupsi," ujar Benny.

Benny juga membedakan antara agenda pemberantasan korupsi dan agenda pemulihan aset negara. Menurutnya, keduanya merupakan dua substansi berbeda yang memerlukan instrumen hukum masing-masing.

"Agenda berantas korupsi dan perampasan aset dua substansi yang berbeda. UU Perampasan Aset diperlukan agar aset-aset hasil korupsi dan atau aset-aset yang menjadi alat untuk korupsi dapat dirampas untuk kepentingan negara," katanya.

Ia bahkan mengusulkan pembentukan badan otonom khusus di luar KPK maupun Kejaksaan untuk mengelola aset sitaan negara. Lembaga tersebut, kata dia, harus diisi para ahli hukum yang berintegritas agar aset hasil korupsi dapat dirampas, dilelang, dan hasilnya masuk sebagai penerimaan negara.

RI Dinilai Darurat Korupsi

Usulan hukuman mati sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Umum MUI KH M. Cholil Nafis. Menurutnya, pembahasan mengenai pidana mati bukanlah gagasan baru karena telah beberapa kali didiskusikan bersama pemerintah, termasuk saat Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM,

Imigrasi, dan Pemasarakatan Yusril Iha Mahendra berkunjung ke MUI.

"Kita kan selalu diskusi. Berapa yang lalu kan Pak Yusril ke MUI bicara dua hal, soal hukuman mati, soal hukum LGBT. Kita selalu mendiskusikan," ujar Cholil.

MUI menilai korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan sehingga negara perlu mempertimbangkan sanksi paling berat. Menurut Cholil, hukum harus mengikuti rasa keadilan masyarakat (common sense) dan pendapat umum (common opinion) yang berkembang.

"Apa yang menjadi perbincangan publik dan menjadi diskusi publik, dan nanti menjadi common sense kita, bahkan common opinion kita, satu pendapat bahwa ini dibutuhkan, ya pemerintah mau tidak mau harus mengakomodir itu."

Ia menilai banyaknya operasi tangkap tangan dan penindakan terhadap koruptor justru menjadi indikator bahwa sistem pencegahan belum bekerja efektif.

"Penangkapan yang sekian banyak itu bukan keberhasilan pemberantasan korupsi, tapi menunjukkan kegagalan pemberantasan korupsi. Karena orang tidak takut dan orang tidak jera," kata Cholil.

Meski demikian, MUI menegaskan pidana mati tidak dimaksudkan menggantikan mekanisme perampasan aset. Kedua instrumen tersebut, menurut Cholil, justru harus diterapkan secara bersamaan.

PERBANDINGAN STATUS HUKUM MATI KORUPTOR DAN SKOR CPI

Denmark

- Status Hukum : Dihapus / Tidak Ada
- Skor CPI (Skala 0-100) : ~90
- Kategori Kebersihan: Sangat Bersih

Selandia Baru

- Status Hukum : Dihapus / Tidak Ada
- Skor CPI (Skala 0-100): ~87
- Kategori Kebersihan: Sangat Bersih

Tiongkok (China)

- Status Hukum : Aktif Diterapkan
- Skor CPI (Skala 0-100): ~42
- Kategori Kebersihan: Korup Ringan-Sedang

Vietnam

- Status Hukum : Aktif Diterapkan
- Skor CPI (Skala 0-100): ~41
- Kategori Kebersihan: Korup Sedang

Korea Utara

- Status Hukum : Aktif Diterapkan
- Skor CPI Skala 0-100): ~17
- Kategori Kebersihan: Sangat Korup

"Jadi tidak dikotomi bahwa hukuman mati tanpa mengambil kekayaan. Kalau sudah mati, kekayaan milik negara dikembalikan. Dua-duanya sebenarnya perlu, perampasan aset iya, dan kalau menimbulkan masalah sistemik/kehancuran negara, perlu dilakukan hukuman mati," ujarnya.

Perdebatan mengenai hukuman mati sebenarnya bukan muncul dari ruang kosong. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana mati telah diatur melalui Pasal 2 ayat (2), meski hanya dapat diterapkan dalam keadaan tertentu.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan bahwa dasar hukum pidana mati bagi koruptor sesungguhnya telah tersedia. (tin,rls,kum,ist/dya)

Keracunan MBG di Papua dan Semarang TEMUAN E. COLI BUKA FAKTA BARU

Temuan bakteri *Escherichia coli* (*E. coli*) dalam sejumlah menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua dan Semarang membuka petunjuk baru penyebab rentetan kasus keracunan yang kembali mencoreng program prioritas pemerintah itu. Hasil investigasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan persoalan bukan hanya terletak pada satu jenis makanan, melainkan pada sejumlah menu yang terkontaminasi bakteri.



Para pelajar dari Distrik Depapre ditangani di tenda darurat di halaman RSUD Yowari, Jayapura, Selasa (4/8/2026). (ist.dok)

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tim Kemenkes langsung diterjunkan setiap kali terjadi insiden keracunan makanan dalam program MBG. Hasil pemeriksaan laboratorium, kata dia, telah selesai dan menjadi dasar pemberian rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

"Begitu itu ada keracunan, tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah turun. Lapornya sudah ada, hasil labnya juga sudah ada, jadi memang kita identifikasi ada beberapa makanan yang ada bakteri *E. coli*-nya, bukan hanya semangka tapi ada beberapa makanan lain," kata Budi Gunadi di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Menurut Budi, Kemenkes telah menyampaikan berbagai catatan mengenai persoalan yang ditemukan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada BGN. Ia juga mengapresiasi respons cepat Kepala BGN Sudaryono dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Temuan laboratorium itu memperkuat dugaan bahwa persoalan keamanan pangan dalam MBG tidak semata dipicu oleh kualitas bahan makanan, tetapi juga tata kelola dapur, terutama terkait waktu pengolahan dan penyajian makanan.

Sudaryono mengakui hasil evaluasi BGN menunjukkan pelanggaran prosedur terjadi di dapur penyedia MBG, baik di Papua maupun Semarang. Berdasarkan catatan operasional atau log dapur, makanan dimasak jauh lebih awal dibanding batas waktu yang

ditetapkan.

"Kalau di Papua kita lihat dari log. Log dapurnya itu kan kita ada sistem lognya, dia kapan persiapan, kapan nyacah, kapan apa, kapan dimasak itu ada. Jadi memang memulai masaknya kecepatan, kalau enggak salah jam 7 atau setengah 8 hari sebelumnya untuk diberi makan di hari berikutnya di jam 11," ujar Sudaryono.

Dalam penjelasan lain, Sudaryono menyebut waktu memasak di Papua bahkan dimulai sekitar pukul 19.00 hingga 19.30 pada malam sebelumnya, sementara makanan baru disajikan sekitar pukul 11.00 keesokan harinya. Praktik serupa juga ditemukan di Semarang, ketika dapur mulai memasak sekitar pukul 21.00 pada malam sebelum makanan didistribusikan kepada siswa.

"Jadi memang memulai masaknya terlalu cepat, kalau enggak salah pukul 19.00 atau 19.30 di hari sebelumnya untuk diberi makan pada hari berikutnya di pukul 11.00, jadi itu sudah melanggar, termasuk yang di Semarang, Jawa Tengah, juga sama, dia mulai masak jam 21.00. Ini kan masalah kedisiplinan, nah ini kita lagi cari formula (untuk mengawasi SPPG yang melanggar)," kata Sudaryono.

Menurut dia, keracunan makanan merupakan persoalan fatal karena menyangkut keselamatan penerima manfaat. Karena itu, BGN menetapkan target menekan angka kejadian hingga nol.

"Target saya adalah gimana caranya,

apapun caranya, bagaimana caranya, itu kemudian nol. Case keracunannya," ujar Sudaryono.

BGN sebelumnya juga telah meningkatkan status insiden keracunan MBG menjadi kejadian fatal serta mencopot kepala SPPG yang dapurnya ditangguhkan sebagai bentuk sanksi administratif.

Selain sanksi administratif berupa penghentian operasional maupun pencopotan pengelola dapur, BGN juga membuka kemungkinan membawa kasus ke ranah pidana apabila ditemukan unsur kesengajaan.

Sudaryono mengatakan pihaknya masih menyusun mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran disiplin di SPPG. Namun, apabila ditemukan indikasi sabotase atau tindakan yang disengaja, BGN tidak akan ragu menyerahkannya kepada aparat penegak hukum.

"Kalau memang ada unsur-unsur

lain, ya misalnya ada unsur kesengajaan, sabotase, dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian," katanya.

Ia kembali menegaskan sikap tersebut dalam kesempatan lain.

"Memang kalau ada ya kita serahkan semua, bukan kemudian kita tutup-tutupi atau kemudian kita bela, karena kalau salah, ngapain dibela."

Meski demikian, Sudaryono mengingatkan setiap kasus tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Menurut dia, tidak semua kejadian keracunan bersumber dari kesalahan dapur.

Ia mencontohkan adanya kasus ketika makanan yang telah dibagikan sesuai prosedur justru dibawa pulang oleh siswa untuk dikonsumsi bersama keluarga. Makanan yang seharusnya disantap segera itu kemudian dikonsumsi setelah melewati waktu yang semestinya sehingga anggota keluarga penerima ikut mengalami gangguan kesehatan. (ist, far/dya)

RANGKUMAN KASUS KERACUNAN MBG 2026

- **Kabupaten Jayapura (Agustus):**
Ratusan pelajar dan warga di Distrik Depapre mengalami mual dan muntah usai menyantap menu MBG.
- **Jepara (Juli-Agustus):**
123 siswa dan guru SMPN 2 Jepara diduga keracunan dari menu SPPG Pakisrejo.
- **Semarang (Juli):**
Insiden keracunan massal kembali terjadi di sebuah SMK Negeri, menambah korban dari kasus sebelumnya.
- **Nasional (Januari-April):**
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat 33.626 pelajar diduga mengalami keracunan terkait program MBG.



KASUS CIBIRAN PASIEN BPJS, 10 NAKES DIIDENTIFIKASI

Kasus ini bermula dari keluhan seorang pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Alih-alih mendapat simpati, ia justru menerima komentar bernada sinis dari sejumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan. Respons yang dinilai tidak berempati itu memicu kecaman publik, terlebih setelah pasien tersebut meninggal dunia. Kini, Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) bersama organisasi profesi menelusuri dugaan pelanggaran etik tersebut. KKI telah mengidentifikasi sedikitnya 10 tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diduga mengunggah komentar tidak berempati kepada pasien BPJS di media sosial. Mayoritas merupakan dokter, sementara sisanya berasal dari profesi perawat.



Anggota Pimpinan KKI, Mohammad Syahril (tengah) di Gedung Konsil Kesehatan Indonesia, Jakarta, Kamis (6/8/2026). (Dok.ist)

Anggota KKI, Muhammad Syahril, mengatakan penelusuran dilakukan bersama organisasi profesi setelah muncul dugaan pelanggaran etika dalam komunikasi digital.

"Yang diundang ini adalah ada 10 ya yang sudah terdeteksi. Dokter lebih banyak. Ada dokter, ada dokter gigi, ada PPNI (perawat). Nah ini aja, yang lain belum masuk. Mudah-mudahan tidak ada lagi, dan ini menjadi yang terakhir kalau bisa," kata Syahril dalam konferensi pers di Gedung KKI, Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2026).

Kasus tersebut, menurut Syahril, tidak hanya menjadi perhatian KKI, tetapi juga organisasi profesi yang menaungi tenaga kesehatan. Penelusuran dilakukan sesuai kewenangan masing-masing lembaga untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran etik, disiplin profesi, maupun hukum.

Anggota KKI lainnya, Agus Samsudin, menjelaskan identifikasi awal telah dilakukan. Saat ini KKI berkoordinasi dengan masing-masing organisasi profesi agar proses tindak lanjut dapat segera berjalan.

"Terkait identifikasi, kami sudah melakukan identifikasi awal. Karena itu hari ini kami berkoordinasi dengan masing-masing organisasi profesi agar dapat segera melakukan tindak

lanjut sesuai kewenangannya. Koordinasi yang kuat antara KKI dan organisasi profesi menjadi bagian yang sangat penting dalam penanganan persoalan ini," ujar Agus.

Selain proses pemeriksaan, KKI juga berencana memperkuat pembinaan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menggunakan media sosial. Menurut Agus, lembaganya akan menyusun pedoman yang lebih rinci agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

"Kami juga nanti akan melakukan pembinaan secara khusus dari bagian pembinaan KKI terkait penggunaan media sosial ini. Sehingga ke depan memang perlu dibuat guideline yang lebih detail supaya ini tidak terulang," katanya.

Meski demikian, KKI belum menentukan bentuk sanksi terhadap para tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang diduga terlibat. Agus menegaskan proses penelusuran masih berlangsung sehingga keputusan mengenai sanksi belum dapat diumumkan.

"Karena kita masih dalam tahap penelusuran, kami tidak bisa menyampaikan sanksinya seperti apa untuk sekarang ini."

Agus juga menolak anggapan bahwa pasien BPJS memiliki stigma negatif di kalangan tenaga kesehatan.

Menurut dia, BPJS Kesehatan justru menjadi salah satu fondasi penting sistem pelayanan kesehatan nasional.

"BPJS tidak ada stigma. Bahkan menurut saya menjadi salah satu pilar di dalam pengobatan di Indonesia. Karena banyak sekali pasien yang memerlukan pertolongan, dan karena BPJS dia bisa survive."

Muhammad Syahril menjelaskan komentar yang disampaikan tenaga medis maupun tenaga kesehatan dapat berimplikasi pada tiga ranah berbeda, yakni pelanggaran etik, pelanggaran disiplin profesi, atau pelanggaran hukum. Masing-masing memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri.

Namun, dalam kasus komentar terhadap pasien BPJS ini, KKI menilai dugaan pelanggaran lebih mengarah pada etika profesi di ruang digital.

"Kasus ini sudah sepatutnya kita tindak lanjuti karena ini dugaan pelanggaran etika, khususnya etika di dalam virtual," ujar Syahril.

Dalam penelusuran tersebut, KKI juga berkoordinasi dengan institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga pemerintah daerah tempat tenaga kesehatan yang bersangkutan belajar atau bekerja. Langkah itu dilakukan agar pembinaan dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Syahril menegaskan sikap empati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan. Karena itu, penghormatan terhadap martabat pasien harus dijaga, baik saat memberikan pelayanan langsung maupun ketika berkomunikasi di ruang digital.

Ia mengingatkan bahwa penggunaan media sosial juga merupakan bagian dari tanggung jawab profesional. Setiap tenaga kesehatan wajib menggunakan platform digital secara bijaksana dan menghindari pernyataan yang dapat melukai pasien ataupun menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi kesehatan.

IDI Siapkan Sidang Etik

Wakil Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Wiweka, mengatakan dokter tetap terikat kode etik profesi ketika menggunakan media sosial, meskipun tidak sedang menjalankan praktik kedokteran.

Menurut dia, IDI telah memiliki Fatwa Etik Nomor 024 Tahun 2021 tentang Bermedia Sosial sebagai pedoman bagi para dokter.

"Langkah pertama adalah kita tabayun dulu. Kita panggil sejawat kita, benar enggak, kita klarifikasi. Kalau memang nanti dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dinilai terdapat dugaan pelanggaran etik, baru dilakukan sidang etik," kata Wiweka.

Ia menambahkan, bentuk sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang terbukti. Namun, pendekatan utama tetap diarahkan pada pembinaan agar kepatuhan terhadap etika menjadi budaya dalam profesi kesehatan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turut menjelaskan duduk perkara di balik kasus pasien BPJS Kesehatan yang mengaku harus menunggu delapan jam sebelum mendapatkan ruang perawatan. Pasien tersebut ternyata menjalani penanganan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), rumah sakit rujukan nasional.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Azhar Jaya, mengatakan lamanya waktu tunggu bukan disebabkan pasien menanti ruang rawat inap biasa, melainkan karena membutuhkan perawatan di High Care Unit (HCU) yang memiliki kapasitas terbatas.

"Prinsipnya di RSCM adalah pusat rujukan nasional, kemungkinan besar RSCM penuh itu sangat besar. Tapi apa harus menunggu 8 jam itu tergantung situasi, kalau kosong ya lebih cepat dari itu," kata Azhar Jaya, Kamis (6/8).

Azhar, yang akrab disapa Aco, menjelaskan kondisi pasien memang mengharuskan penanganan di HCU. Namun, saat itu seluruh tempat tidur di unit tersebut sedang penuh sehingga pasien harus menunggu.

"Kondisi pasien yang meninggal dan viral itu memang menunggu 8 jam karena butuh HCU yang jumlahnya terbatas dan bukan kamar rawat inap biasa," ujarnya. (gus.ist,met/dya)

Puluhan Jabatan Kepsek Kosong, Disdikbud Kota Malang: Segera Diisi



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana. (Santi/Lentera)

MALANG - Kosongnya puluhan jabatan kepala sekolah (Kepsek) di Kota Malang disorot. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memastikan proses pengisian segera dilakukan. Namun digarisbawahi jika harus melalui mekanisme baru yang lebih panjang sesuai ketentuan

pemerintah pusat.

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, mengatakan pengisian kepala sekolah tidak lagi dapat dilakukan secara cepat seperti sebelumnya. Kini, setiap usulan harus melalui serangkaian tahapan koordinasi hingga mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

"Dalam waktu dekat ini kami lakukan pengisian. Sekarang prosesnya memang harus kami ajukan ke pusat terlebih dahulu, sehingga seluruh persyaratan harus dilengkapi sebelum diusulkan," ujar Suwarjana, Kamis (6/8/2026).

Dijelaskannya, sebelum adanya sistem baru, pengisian jabatan kepala sekolah dapat dilakukan dalam waktu singkat. Namun saat ini mekanisme

tersebut berubah karena seluruh proses dilakukan secara terintegrasi melalui sistem pemerintah pusat.

Sebelum usulan dikirim, Disdikbud Kota Malang terlebih dahulu menggelar rapat bersama berbagai pihak, mulai dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Sekretaris Daerah, Dewan Pendidikan, hingga tim internal Disdikbud.

Selain itu, koordinasi juga melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), pengawas sekolah, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), serta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) sebelum usulan diajukan kepada Wali Kota Malang. "Kalau semua sudah disetujui, baru kami ajukan ke Pak Wali. Setelah itu baru kami upload ke pusat untuk diverifikasi apakah kepala sekolah yang diusulkan memenuhi syarat atau belum," jelasnya.

Saat ini terdapat sekitar 35 jabatan kepala sekolah dasar (SD) dan empat jabatan kepala sekolah menengah

pertama (SMP) yang masih kosong. Selama proses pengisian berlangsung, seluruh sekolah tersebut dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Lebih lanjut, Suwarjana mengatakan, sistem yang diterapkan pemerintah pusat secara otomatis akan menolak usulan mutasi kepala sekolah yang belum memenuhi persyaratan masa jabatan.

Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi adalah kepala sekolah telah menjabat minimal 2 tahun di sekolah asal sebelum dapat dimutasi ke sekolah lain. "Kalau baru menjabat satu setengah tahun misalnya, kami ajukan seperti apa pun akan langsung ditolak oleh sistem. Jadi minimal harus dua tahun," katanya.

Tidak hanya terkait mutasi, sistem juga memperhatikan masa periode jabatan kepala sekolah. Menurutnya, kepala sekolah yang telah menyelesaikan periode pertama namun belum memperoleh perpanjangan masa tugas juga tidak dapat diproses untuk mutasi. (Santi/Dya)

Bupati Malang Bakal Bahas Regulasi Pencegahan LGBT Bersama DPRD

MALANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bakal membahas regulasi terkait pencegahan LGBT bersama DPRD Kabupaten Malang.

Wacana tersebut disampaikan Bupati Malang, Sanusi sebagai tindak lanjut atas sikap pemerintah daerah yang menyatakan tidak mentoleransi aktivitas penyimpangan sosial maupun penyimpangan seksual.

"Kami di Kabupaten Malang tidak mentoleransi kegiatan penyimpangan sosial maupun penyimpangan seksual dalam bentuk apa pun, termasuk LGBT. Kami larang hal tersebut di Kabupaten Malang," ujarnya, ditemui usai Sosialisasi Pencegahan Penyimpangan Seksual di Pendopo Agung Malang, Kamis (6/8/2026).

Dikatakannya, wacana penyusunan regulasi tersebut masih berada pada tahap awal dan akan terlebih dahulu dibahas bersama DPRD Kabupaten Malang.

Sanusi menegaskan, Pemkab Malang berencana melakukan koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Kepolisian Resor (Polres) Malang, Kejaksaan, hingga kalangan perguruan

tinggi, guna menghimpun masukan sebelum menentukan langkah kebijakan lebih lanjut.

Di sisi lain, Pemkab Malang juga menyiapkan sejumlah langkah pencegahan, mulai dari penguatan edukasi kepada masyarakat hingga pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak, sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Menurut Sanusi, upaya pencegahan perlu dilakukan sejak dini melalui lingkungan keluarga dan satuan pendidikan, baik yang berada di bawah naungan Kementerian Agama maupun Kemendikdasmen.

Sanusi menjelaskan, Satgas Perlindungan Anak nantinya akan dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang.

"Tugasnya meliputi edukasi kepada masyarakat, perlindungan terhadap korban, hingga pendampingan dan layanan konseling bagi korban kekerasan seksual maupun perundungan terhadap anak," kata Sanusi.

Sementara itu, menindaklanjuti

sikap Bupati Malang yang disebut tidak mentoleransi aktivitas LGBT, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo, mengatakan akan membentuk Satgas yang melibatkan berbagai unsur.

Arbani menyebut keanggotaan Satgas tidak hanya berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga melibatkan unsur masyarakat, akademisi, hingga tenaga medis agar penanganan dilakukan secara komprehensif.

Namun Arbani menegaskan, pendekatan yang dilakukan tidak dapat bersifat represif. Menurutnya, penanganan harus dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan aspek edukasi dan pembinaan.

"Tetapi kita juga harus pelan-pelan, tidak bisa langsung kita tolak. Karena menurut saya, itu bukan keinginan mereka juga, tetapi itu diciptakan oleh



Bupati Malang, Sanusi, ditemui di Pendopo Agung Malang, Kamis (6/8/2026). (Santi/Lentera)

lingkungan," katanya.

Arbani berpandangan, pola pengasuhan keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak sejak usia dini. Karena itu, ia menilai penguatan parenting menjadi salah satu langkah preventif yang perlu diperkuat. "Akhlaq pertama dibentuk oleh kedua orang tua. Setelah itu baru diserahkan ke lembaga pendidikan untuk pendidikan formalnya," pungkasnya. (santi/dya)

DIPICU KRISIS AMUNISI, TRUMP MURKA KE MENHAN AS

Kekhawatiran atas menipisnya persediaan amunisi Amerika Serikat (AS) memicu polemik di kalangan pemerintahan Presiden Donald Trump. Laporan media Amerika menyebut Trump memarahi Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dalam rapat kabinet setelah mengetahui stok rudal dan amunisi strategis ternyata jauh lebih terbatas daripada yang ia bayangkan. Persoalan itu bahkan disebut ikut memengaruhi keputusan Gedung Putih membatalkan rencana serangan besar terhadap Iran.

Laporan tersebut pertama kali diungkap The Washington Post, yang mengutip dua sumber yang mengetahui jalannya rapat kabinet di Camp David, Maryland, pada Jumat (31/7/2026). Informasi itu kemudian dikutip AFP, Al Arabiya, Reuters, hingga berbagai media internasional pada Kamis (6/7/2026).

Menurut laporan tersebut, Trump menuntut penjelasan dari Hegseth terkait maraknya pemberitaan mengenai menipisnya stok amunisi militer Amerika Serikat setelah perang melawan Iran.

Presiden AS itu dikabarkan terkejut karena sebelumnya mengira persoalan tersebut sudah diselesaikan.

"Saya kira masalah amunisi itu sudah diatasi," kata Trump kepada Hegseth, menurut salah satu sumber yang dikutip The Washington Post.

Ucapan itu mencerminkan kekecewaan Trump yang merasa tidak memperoleh informasi utuh mengenai kesiapan logistik militer negaranya.

Menurut sumber yang sama, keterbatasan stok persenjataan--terutama rudal jarak jauh dan rudal pencegat pertahanan udara--menjadi salah satu faktor yang membuat Trump mengurungkan rencana melancarkan serangan besar terhadap Iran dalam beberapa hari terakhir.

Washington Post menyebut persoalan logistik militer itu membatasi pilihan strategis Gedung Putih. Trump sebelumnya bahkan sempat menyebut operasi yang dipersiapkan tersebut berpotensi menjadi "serangan terbesar sejak Perang Dunia II." Rencana itu sedianya dijalankan pada akhir pekan lalu sebelum akhirnya dibatalkan.

Keputusan tersebut secara resmi dijelaskan Trump sebagai langkah untuk memberi ruang bagi diplomasi. Ia mengaku pemerintah Iran bersama sejumlah negara Timur Tengah meminta Washington menunda operasi militer.

Namun, laporan Washington Post menunjukkan alasan di balik pembatalan itu tidak semata-mata diplomatik. Ketersediaan amunisi ternyata menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan.



Presiden AS Donald Trump dan Menhan Pete Hegseth. (AP Photo.dok)

Data yang beredar dalam beberapa hari terakhir menunjukkan tekanan besar terhadap persediaan persenjataan strategis AS. Washington Post melaporkan bahwa selama bulan pertama perang melawan Iran, militer AS telah menembakkan lebih dari 850 rudal jelajah Tomahawk, lebih dari 1.000 rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), serta sedikitnya 1.300 rudal balistik taktis.

Sementara itu, laporan CNN menyebut para pejabat senior Pentagon telah memperingatkan bahwa cadangan sistem pertahanan udara AS di Timur Tengah terkuras akibat harus terus-menerus mencegah rudal balistik dan drone Iran. Data yang dihimpun menunjukkan sekitar 80 persen stok rudal THAAD telah digunakan dibandingkan sebelum perang, sedangkan sekitar 50 persen persediaan rudal Patriot juga telah terpakai.

Sebelum konflik pecah, lembaga kajian Center for Strategic and International Studies (CSIS) memperkirakan AS memiliki sekitar 452 rudal THAAD dan sekitar 2.200 rudal Patriot dari dua varian modern.

Reuters juga sebelumnya melaporkan Angkatan Darat AS telah menggunakan "hampir seluruh" persediaan rudal permukaan-ke-udara jarak jauh berpresisi tinggi. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran di kalangan negara-negara sekutu Washington di kawasan Teluk yang selama ini bergantung pada

sistem pertahanan udara Amerika Serikat.

Para penasihat militer Trump disebut memperingatkan bahwa memperluas konflik tanpa cadangan amunisi yang memadai dapat membahayakan pangkalan-pangkalan militer AS di kawasan, sehingga menjadi salah satu pertimbangan utama pembatalan serangan terhadap Iran.

Washington Post melaporkan bahwa setelah mendapat teguran dari Trump, Hegseth membela diri dengan menyalahkan Wakil Menteri Pertahanan Stephen Feinberg.

Menurut laporan tersebut, Hegseth menilai Feinberg gagal memastikan presiden menerima informasi yang lengkap mengenai kondisi stok amunisi sehingga Trump tidak mengetahui situasi sebenarnya.

Perselisihan itu menjadi indikasi adanya persoalan komunikasi di internal pemerintahan mengenai kesiapan logistik militer Amerika Serikat pada saat konflik dengan Iran masih berlangsung.

Meski demikian, Gedung Putih membantah laporan Washington Post. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan dirinya berada di Camp David saat rapat kabinet berlangsung dan menyebut pertengkaran antara Trump dan Hegseth tidak pernah terjadi.

"Saya berada di Camp David bersama Presiden Trump dan

PERBANDINGAN KEKUATAN MILITER: AS VS IRAN (GLOBAL FIREPOWER 2025)

Peringkat Dunia:

	#1
	#16 (dari 145 negara)

Anggaran Pertahanan

	\$895 Miliar
	\$15,5 Miliar

Personel Militer

Aktif	Cadangan	Paramiliter
1,328,000	799,500	0
610,000	350,000	220,000

Kekuatan Darat

Tank	Artilleri Tarik	
 4,640	 1,212	
 1,713	 2,070	
Kendaraan Lapis Baja	Peluncur Roket:	Artilleri Gerak
 391,963	 641	 671
 65,825	 1,517	 382

Kekuatan Udara

Total Pesawat	Pesawat Tempur	Helikopter Tempur
13,043	1,790	1,002
551	186	13

Kekuatan Udara

Kapal Induk	Kapal Selam	Kapal Cepat	Kapal Perusak
11	70	13	81
0	25	56	0



Menteri Hegseth. Cekcok itu benar-benar tidak pernah terjadi. Kami bahkan sudah mengatakannya kepada Washington Post berulang kali," kata Leavitt melalui akun media sosial X.

Ia menuding laporan tersebut sengaja disebarkan untuk mendiskreditkan Menteri Pertahanan.

"Kisah bohong ini disebarkan ke banyak media oleh seseorang yang jelas-jelas berniat menjelekkan Menteri, entah karena alasan apa. Sayangnya, Presiden menyukai Menteri dan berpikir dia melakukan pekerjaan yang luar biasa," ujarnya.

Di tengah polemik tersebut, Trump kembali membantah bahwa Amerika Serikat mengalami krisis amunisi. Melalui Truth Social pada Kamis (6/8/2026), ia menegaskan persediaan senjata negaranya masih sangat besar.(gus,ist,rtr/dya)

5 Hobi Seru saat Sendirian yang Bikin Pikiran Lebih Tenang

Waktu sendirian sering kali dianggap identik dengan rasa sepi. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa me time yang dijalani secara sadar justru dapat membantu seseorang mengenali diri sendiri, mengurangi stres, hingga meningkatkan kreativitas.

Psikolog menyebut kemampuan menikmati waktu sendiri sebagai bagian dari solitude, yakni kondisi ketika seseorang memilih menyendiri untuk memulihkan energi, bukan karena merasa terisolasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, tren ini juga semakin populer seiring meningkatnya perhatian terhadap kesehatan mental dan praktik self-care.

Mengisi waktu sendiri pun tak harus dihabiskan dengan menggulir media sosial. Ada banyak aktivitas sederhana yang dapat membuat pikiran lebih rileks sekaligus memberi manfaat jangka panjang.

Journaling Redakan Pikiran Penuh

Menulis jurnal menjadi salah satu aktivitas yang paling banyak direkomendasikan dalam praktik self-care.

Dengan menuangkan pikiran dan perasaan ke dalam tulisan, seseorang dapat mengenali emosi yang dirasakan sekaligus mengurangi beban mental.

Sejumlah penelitian yang dipublikasikan American Psychological Association (APA) dan berbagai jurnal psikologi menunjukkan bahwa expressive writing dapat membantu menurunkan tingkat stres serta meningkatkan kesejahteraan emosional.

Tak sedikit pula yang menjadikan journaling sebagai media berkreasi. Halaman jurnal dihiasi stiker, bunga kering, gambar, maupun ilustrasi sehingga aktivitas ini terasa lebih menyenangkan.

Agar lebih bermakna, jurnal dapat diawali dengan menuliskan rasa syukur atau afirmasi positif, lalu ditutup dengan target maupun motivasi untuk diri sendiri.

Baca dan Tulis Perkaya Perspektif

Membaca bukan sekadar hiburan. Aktivitas ini membantu memperluas wawasan, meningkatkan empati, serta melatih kemampuan memahami sudut pandang orang lain.

Setelah membaca, banyak orang memilih melanjutkannya dengan menulis—baik berupa catatan, puisi, cerita pendek, hingga refleksi pribadi. Kombinasi membaca dan menulis dinilai efektif melatih kreativitas sekaligus menjaga kesehatan kognitif.

Pilihan bacaan pun beragam, mulai dari novel, buku sejarah, pengembangan diri, antologi puisi, hingga buku tentang bahasa asing.

Olahraga Jaga Tubuh dan Pikiran

Kesehatan mental tidak terlepas dari kondisi fisik. Aktivitas olahraga terbukti membantu tubuh melepaskan hormon endorfin yang berkaitan dengan rasa bahagia.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan orang dewasa melakukan aktivitas fisik intensitas sedang selama 150–300 menit setiap pekan untuk menjaga kesehatan tubuh dan mental.

Jika ingin menikmati waktu sendiri, beberapa pilihan olahraga yang bisa dilakukan antara lain yoga, lari, bersepeda, berenang, atau latihan beban.

Selain meningkatkan kebugaran, olahraga rutin juga membantu memperbaiki kualitas tidur dan menjaga daya tahan tubuh.

Puzzle-Sudoku Latih Otak

Sekali menjauh dari gawai juga bisa menjadi bentuk self-care. Permainan konvensional seperti puzzle, teka-teki silang, sudoku, hingga solitaire dapat melatih konsentrasi, kemampuan memecahkan masalah, serta berpikir strategis.

Aktivitas semacam ini juga memberi kesempatan otak untuk fokus pada satu hal tanpa gangguan notifikasi, sehingga membantu mengurangi kelelahan mental akibat paparan layar yang terus-menerus.

Fotografi Nikmati Momen

Tak harus bepergian jauh, berjalan santai di sekitar lingkungan rumah sambil membawa kamera atau ponsel bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan.

Fotografi mendorong seseorang lebih memperhatikan detail yang sering terlewat, mulai dari cahaya matahari, pepohonan, aktivitas warga, hingga ekspresi manusia.

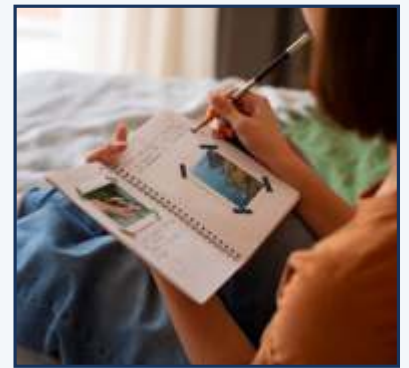
Dalam psikologi, aktivitas ini dikenal dapat melatih mindfulness, yakni kemampuan menikmati momen saat ini dengan penuh kesadaran.

Hasil foto pun bisa dimanfaatkan kembali sebagai koleksi pribadi, unggahan media sosial, hingga pelengkap jurnal harian.

Pakar kesehatan mental menilai me time bukan soal berapa lama seseorang menyendiri, melainkan bagaimana waktu tersebut

digunakan untuk memulihkan energi.

Mengurangi penggunaan media sosial, melakukan aktivitas yang disukai, dan memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan hidup di tengah rutinitas yang padat. (farist/dya)



Robot Vacuum Bakal Dilarang di AS, Bahayakan Data Pengguna

Robot vacuum selama ini dipasarkan sebagai solusi praktis untuk membersihkan rumah tanpa campur tangan pemilik. Namun, kecanggihannya yang membuat perangkat ini mampu memetakan ruangan dan mengenali setiap sudut rumah kini justru menjadi sumber kekhawatiran baru.

Pemerintah Amerika Serikat tengah mempertimbangkan aturan yang dapat membatasi masuknya sejumlah robot pintar buatan luar negeri, termasuk robot penyedot debu otomatis. Alasannya bukan terkait kualitas produk atau keselamatan penggunaan, melainkan potensi risiko keamanan data yang dikumpulkan perangkat tersebut.

Laporan Mashable menyebutkan, Federal Communications Commission (FCC) mengusulkan regulasi yang akan memperketat izin perangkat pintar yang terhubung ke internet. Kebijakan itu merupakan bagian dari langkah pemerintah AS memperkuat perlindungan terhadap data pengguna sekaligus membatasi potensi akses pihak asing terhadap informasi sensitif.

Bisa 'Melihat' Isi Rumah

Robot vacuum generasi terbaru tak lagi sekadar bergerak mengikuti jalur acak untuk menyedot debu.

Perangkat modern kini dibekali kamera, sensor LiDAR (Light Detection and Ranging), Wi-Fi, Bluetooth, hingga kecerdasan buatan (AI). Kombinasi teknologi tersebut memungkinkan robot membuat peta digital rumah, mengenali posisi furnitur,

menentukan rute pembersihan paling efisien, bahkan mengingat tata letak setiap ruangan.

Kemampuan itu memungkinkan meningkatkan pengalaman pengguna. Robot dapat membersihkan area tertentu sesuai perintah, menghindari benda kecil di lantai, hingga membedakan jenis permukaan.

Namun di sisi lain, semakin banyak informasi yang dikumpulkan, semakin besar pula potensi risiko apabila data tersebut bocor atau diakses pihak yang tidak berwenang.

Menurut FCC, perangkat yang mampu memetakan bagian dalam rumah dan mengirimkan data melalui internet perlu mendapat pengawasan lebih ketat karena informasi tersebut tergolong sensitif.

Usulan FCC bukan berarti seluruh robot vacuum akan langsung dilarang digunakan di Amerika Serikat.

Perangkat yang telah memperoleh sertifikasi FCC dan sudah beredar di pasaran tetap dapat dijual maupun digunakan konsumen.

Pembatasan diperkirakan lebih menasar model baru dari produsen tertentu yang dinilai tidak memenuhi persyaratan keamanan nasional apabila aturan tersebut resmi



diberlakukan. Karena sebagian besar produsen robot vacuum terbesar berasal dari China seperti Roborock, Ecovacs, Dreame, Narwal, dan Xiaomi kebijakan tersebut berpotensi memberi dampak signifikan terhadap pasar perangkat rumah pintar.

Selain robot vacuum, usulan regulator juga mencakup perangkat robotik lain yang memiliki kemampuan navigasi, sensor lingkungan, konektivitas nirkabel, dan AI, termasuk robot pemotong rumput otomatis.

Kekhawatiran terhadap robot vacuum merupakan bagian dari perdebatan yang lebih luas mengenai keamanan perangkat

Internet of Things (IoT). Berbagai perangkat rumah pintar, mulai dari kamera CCTV, smart speaker, smart TV hingga bel pintu digital, kini secara rutin mengumpulkan data untuk meningkatkan fungsi layanan.

Pakar keamanan siber mengingatkan bahwa perangkat semacam ini pada dasarnya adalah komputer kecil yang selalu terhubung ke internet. Jika sistem keamanannya lemah atau pembaruan perangkat lunak tidak lagi diberikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu keamanan IoT juga mendapat perhatian regulator di Eropa dan Amerika Serikat melalui penerapan standar keamanan siber yang lebih ketat bagi perangkat konsumen. (farist/dya)



HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAH | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.



Riset Sebut Sebenarnya Cuma Butuh 23 Set Baju di Lemari

Pernah berdiri di depan lemari yang penuh sesak, tetapi tetap merasa "tidak punya baju"? Pengalaman itu ternyata bukan sekadar perasaan. Di tengah derasnya tren fast fashion dan siklus mode yang berganti begitu cepat, penelitian terbaru justru menunjukkan kebutuhan pakaian setiap orang sebenarnya jauh lebih sedikit daripada yang dibayangkan.

Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal *Nature Sustainability* memperkirakan, seseorang idealnya hanya membutuhkan sekitar 85 item fesyen. Hal ini bisa tetap memenuhi kebutuhan berpakaian sekaligus menjaga konsumsi yang lebih ramah lingkungan.

Jumlah tersebut mencakup pakaian, jaket, mantel, hingga sepatu, tetapi belum termasuk pakaian dalam dan aksesoris.

Dari koleksi itu, seseorang dapat menciptakan sekitar 23 set busana yang bisa dipadupadankan untuk berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, berolahraga, bersantai di rumah, hingga menghadiri acara formal. Peneliti bahkan memperkirakan pembelian pakaian baru cukup dibatasi rata-rata lima potong per tahun agar konsumsi tetap berada pada tingkat yang lebih berkelanjutan.

Temuan tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan bukan terletak pada jumlah pakaian, melainkan bagaimana seseorang memanfaatkannya.

Dampak Fast Fashion

Perubahan perilaku belanja tidak bisa dilepaskan dari perkembangan

industri fast fashion. Istilah fast fashion mulai dikenal luas pada awal 1990-an ketika industri pakaian berhasil memangkas waktu produksi dari lebih dari enam bulan menjadi hanya sekitar dua pekan. Model bisnis ini memungkinkan desain yang terinspirasi dari panggung mode internasional diproduksi secara massal dengan harga terjangkau dan masuk ke toko dalam waktu sangat singkat.

Kini siklus tersebut bahkan berlangsung jauh lebih cepat. Platform fesyen daring seperti Shein, misalnya, diketahui dapat merilis sekitar 6.000 produk baru setiap hari, membuat konsumen terus disugahi pilihan dan tren baru hampir tanpa jeda.

Harga yang murah dan model yang selalu mengikuti tren membuat fast fashion sulit ditolak, terutama di tengah gaya hidup digital yang dipengaruhi media sosial dan budaya "haul", di mana membeli pakaian baru menjadi bagian dari konten sehari-hari.

Dampak Lingkungan

Di balik kemudahan memperoleh pakaian murah, terdapat konsekuensi besar terhadap lingkungan.

Industri fesyen diperkirakan menyumbang sekitar 4 persen emisi gas rumah kaca global. Untuk menjaga target Persetujuan Paris agar kenaikan suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat Celsius, sektor fesyen diperkirakan perlu memangkas emisi hingga 1,1 miliar ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e).

Bukan hanya emisi karbon, industri ini juga menjadi salah satu

pengguna air terbesar di dunia serta menghasilkan limbah tekstil dalam jumlah besar.

Menurut UN Environment Programme, sebagian besar pakaian yang dibuang akhirnya berakhir di tempat pembuangan akhir atau dibakar, sementara hanya sebagian kecil yang benar-benar didaur ulang menjadi produk baru.

Kondisi tersebut mendorong munculnya gerakan slow fashion, yaitu pendekatan yang menekankan kualitas, umur pakai pakaian yang lebih panjang, serta kebiasaan membeli secara lebih sadar.

Mengapa Lemari Tetap Terasa Kosong?

Fenomena "lemari penuh tetapi tidak ada yang bisa dipakai" ternyata juga berkaitan dengan psikologi konsumen.

Pakar perilaku konsumen menyebut manusia cenderung mengejar sensasi kebaruan (novelty seeking). Ketika tren terus berganti, pakaian yang masih layak dipakai sering kali dianggap "ketinggalan zaman", meski kondisinya masih sangat baik.

Media sosial juga memperkuat tekanan untuk tampil berbeda dalam setiap kesempatan. Akibatnya, banyak orang membeli pakaian bukan karena benar-benar membutuhkan, melainkan agar tidak mengulang penampilan di foto atau unggahan berikutnya.

Padahal, sejumlah penata gaya menilai lemari yang lebih sederhana justru memudahkan seseorang berpakaian karena setiap item dipilih secara sadar dan mudah dipadukan.

Rumus Capsule Wardrobe

Sebagai respons terhadap budaya konsumsi berlebihan, konsep capsule wardrobe kembali mendapat perhatian.

Prinsipnya sederhana: memiliki koleksi pakaian dalam jumlah terbatas, tetapi saling melengkapi sehingga dapat dikombinasikan menjadi banyak gaya.

Pendekatan ini dinilai tidak hanya menghemat pengeluaran, tetapi juga mengurangi limbah tekstil sekaligus membuat proses memilih pakaian setiap hari menjadi lebih praktis.

Alih-alih terus membeli mengikuti tren, banyak ahli fesyen menyarankan mulai mengevaluasi isi lemari dan memaksimalkan pakaian yang sudah dimiliki. (farist/dya)

Tips Belanja Lebih Bijak

1. Terapkan aturan 24 jam sebelum checkout.
2. Pilih bahan berkualitas agar lebih awet.
3. Gunakan aturan cost per wear: semakin sering dipakai, semakin tinggi nilai sebuah pakaian.
4. Jual atau donasikan pakaian yang sudah tidak digunakan.
5. Utamakan membeli item yang bisa dipadukan dengan minimal tiga pakaian lain di lemari.

Misteri 995 Senjata ...dari Hal 1

Awal mula terbongkarnya temuan tersebut berakar dari konflik internal yayasan sekolah. Mantan Ketua Pengurus Yayasan berinisial Indra Wargadalem (IWD), yang menjabat selama sekitar 15 tahun, diberhentikan pada 18 April 2026. Menurut pengurus yayasan, pemberhentian itu berkaitan dengan dugaan penyelewengan keuangan serta pengalihan aset tanah yayasan atas nama istrinya. Pasca-pemberhentian tersebut, sengketa kepengurusan bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengurus yayasan juga menyebut IWD belum menyerahkan kunci dan akses sejumlah fasilitas penting sehingga kepengurusan baru hanya dapat memanfaatkan ruang-ruang kelas.

Upaya mengambil alih fasilitas sekolah dilakukan pada Jumat, 10 Juli 2026. Pihak yayasan bersama tim pengamanan membuka paksa ruangan kantor yang selama ini terkunci untuk keperluan sarana belajar. Di dalam ruangan tersebut, menurut pihak yayasan, ditemukan sejumlah peti, tas taktis, dan kotak kayu yang berisi ratusan senjata, termasuk yang diduga senjata api dan air gun, yang kemudian dilaporkan kepada aparat kepolisian.

Penyisiran lanjutan dilakukan pada Rabu malam, 5 Agustus 2026, dengan pendampingan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan untuk membuka dua ruangan lain yang rencananya akan difungsikan sebagai ruang guru. Dalam pengeledahan itu, ditemukan berbagai jenis senjata yang masih menjalani proses identifikasi, antara lain laras senjata berkaliber 5,56 milimeter, senjata genggam berkaliber .40 dan 9 milimeter, serta satu pucuk shotgun kaliber 12/70. Petugas juga mengamankan berbagai magasin, termasuk magasin Glock berkapasitas 30 butir, magasin M4, serta komponen lain yang berkaitan dengan persenjataan.

Staf Ahli Ketua Pembina Yayasan Untung Sangaji bersama Kuasa Hukum Yayasan Hermawanto menyatakan jumlah keseluruhan barang yang ditemukan mencapai 995 pucuk. Menurut mereka, sebagian besar merupakan air gun berukuran besar yang mengadopsi model senapan serbu seperti AK-47, M4 Carbine, dan FN P90.

Untung mengklaim sebagian air gun tersebut telah dimodifikasi pada bagian laras menjadi polos tanpa alur sehingga diduga memiliki daya tembus yang menyerupai senjata api. Selain itu, pihak yayasan juga melaporkan penemuan seperangkat alat pembuat peluru beserta buku panduan perakitannya, paket yang



Kuasa hukum sekolah swasta di Jakarta Selatan, Hermawanto, menunjukkan foto temuan senjata saat diwawancarai di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2026). Ist

diduga sabu-sabu, dua linting yang diduga ganja di laci meja kerja eks ketua yayasan, serta 25 keping VCD bermuatan pornografi.

Selain ruangan kantor, perhatian penyidik juga tertuju pada keberadaan ruang bawah tanah yang oleh pihak yayasan disebut sebagai bunker. Ruangan tersebut dilengkapi pintu besi dengan sistem penguncian khusus dan disebut memiliki akses lain yang hingga kini belum berhasil dibuka.

Pihak yayasan memilih tidak membongkar ruangan itu secara sepihak dan meminta kepolisian mengamankan lokasi karena dikhawatirkan masih terdapat barang-barang lain yang perlu diperiksa.

Menindaklanjuti laporan masyarakat dan temuan dari pihak yayasan, Polres Metro Jakarta Selatan menerbitkan Laporan Polisi Model A untuk memulai penyelidikan. Kepolisian juga melibatkan tim Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak (Wasendak) Polda Metro Jaya guna mengidentifikasi jenis senjata, memeriksa spesifikasi teknis, serta melakukan uji balistik. Seluruh 995 barang yang diduga berkaitan dengan persenjataan tersebut dititipkan di Wasendak Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan paket yang diduga narkotika diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba untuk dilakukan uji laboratorium.

Klaim Berizin untuk Ekstrakurikuler

Di sisi lain, kubu Indra Wargadalem secara tegas membantah seluruh tuduhan tersebut. Melalui Direktur PT Lokta Karya Perbakin sekaligus kuasa hukumnya, Alhadid Endar Putra, mereka menyatakan bahwa 995 pucuk senjata yang ditemukan bukanlah senjata ilegal, melainkan

airsoft gun milik PT Lokta Karya Perbakin.

Menurut Alhadid, seluruh peralatan tersebut memiliki izin yang diterbitkan Kapolri melalui Surat Izin Nomor SI/5483-XII/2008, dan salinan dokumen itu telah diserahkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan untuk diverifikasi.

Alhadid juga mengklaim keberadaan ratusan airsoft gun beserta perlengkapannya telah diketahui oleh jajaran Pembina Yayasan sejak 2021 karena digunakan untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler olahraga menembak siswa. Ia membantah barang-barang tersebut disimpan di ruang kerja pribadi Indra Wargadalem. Menurutnya, seluruh peralatan berada di gudang khusus milik PT Lokta Karya Perbakin.

Terkait keberadaan barang tersebut di sekolah, Alhadid menyatakan gudang milik PT Lokta Karya Perbakin telah dikuasai secara sepihak sejak pergantian kepengurusan pada April 2026 sehingga staf perusahaan tidak lagi dapat memasuki ruangan maupun mengeluarkan barang-barang yang tersimpan di dalamnya.

Mengenai temuan paket yang diduga narkotika dan puluhan keping VCD bermuatan pornografi, kubu Indra Wargadalem membantah memiliki keterkaitan dengan barang-barang tersebut. Mereka menilai temuan itu perlu dibuktikan melalui proses penyidikan karena lokasi penyimpanan telah berada dalam penguasaan pihak lain selama beberapa bulan.

DPR Ingatkan Potensi Perdagangan Gelap

Perkembangan kasus ini turut menjadi sorotan di parlemen. Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta aparat kepolisian tidak hanya mengidentifikasi jenis senjata

yang ditemukan, tetapi juga mengusut tuntas jaringan pemasok maupun asal-usul ratusan senjata tersebut. Menurutnya, jumlah temuan yang mencapai 995 pucuk merupakan kasus yang sangat besar sehingga memerlukan penyelidikan yang menyeluruh.

Nasir menilai pengungkapan asal-usul persenjataan itu penting untuk memastikan tidak ada jaringan peredaran senjata ilegal yang beroperasi di Indonesia. Ia juga mengingatkan bahwa lokasi penemuan berada di Jakarta, yang merupakan pusat pemerintahan sekaligus kawasan dengan banyak objek vital nasional.

Karena itu, aparat diminta tidak berhenti pada identifikasi barang bukti semata, melainkan membongkar pihak-pihak yang memasok maupun mendistribusikan senjata tersebut.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengingatkan bahwa temuan tersebut menjadi sinyal masih adanya potensi peredaran senjata gelap. Meski demikian, Nasir mengaku tidak ingin berspekulasi mengenai berbagai isu yang berkembang di ruang publik, termasuk dugaan keterkaitan dengan potensi kerusuhan.

Ia menegaskan seluruh kemungkinan harus dibuktikan melalui proses penyidikan yang profesional dan berbasis alibi.

Menurut Nasir, pengungkapan jaringan pemasok juga penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kemungkinan adanya kelompok-kelompok yang masih memiliki akses terhadap persenjataan. Oleh karena itu, ia meminta kepolisian mengusut perkara tersebut hingga tuntas agar asal-usul seluruh barang yang ditemukan dapat dipastikan secara terang.

Sementara itu, kuasa hukum yayasan, Hermawanto, meminta Polres Metro Jakarta Selatan menangani perkara tersebut secara serius mengingat jumlah barang yang ditemukan sangat besar dan sebagian masih harus diidentifikasi oleh kepolisian. Ia menilai proses penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh agar status seluruh barang bukti, termasuk senjata, amunisi, dan temuan lainnya, dapat dipastikan secara hukum.

Hermawanto juga berharap kepolisian segera membuka ruangan bawah tanah yang oleh pihak yayasan disebut sebagai bunker. Menurutnya, hingga kini yayasan sengaja tidak membuka ruangan tersebut secara sepihak karena khawatir masih terdapat barang-barang lain yang memerlukan penanganan aparat. (wid,ist,rls,kcm/dya)

KPK UNGKAP 3 KALI RAJA JULI BERTEMU BUPATI KUANSING

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penelusuran dugaan suap dalam pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Penyidik tak lagi hanya menyoroti amplop berisi 14.000 dolar Singapura (SGD14.000) yang diduga diberikan Bupati Kuansing Suhardiman Amby kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada 2 Juni 2026. KPK kini mengusut rangkaian tiga pertemuan yang berlangsung sejak April hingga Juni 2026 dan menduga praktik pemberian uang kepada pejabat Kementerian Kehutanan sudah dimulai sebelum pertemuan tersebut.

Pertemuan Raja Juli Antoni dan Suhardiman Amby pada 2 Juni 2026 ternyata bukan awal dari komunikasi keduanya. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan penyidik menemukan indikasi adanya sedikitnya tiga kali pertemuan yang berlangsung pada April, Mei, dan Juni 2026.

"Dan pertemuan dengan Pak Menteri pada tanggal 2 Juni itu juga bukan pertemuan yang pertama, karena penyidik menduga ada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di antaranya di bulan April dan Mei," kata Budi kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

Temuan itu menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk merekonstruksi bagaimana proses pengurusan pelepasan kawasan HPT di Kuansing hingga diduga disertai pemberian uang kepada pejabat negara.

Menurut Budi, penyidik kini mengurai satu per satu materi pembicaraan dalam setiap pertemuan tersebut.

Untuk pertemuan pada April, KPK masih mendalami apakah pembicaraan ketika itu menjadi tahap awal komunikasi mengenai mekanisme pelepasan kawasan hutan yang akan digunakan dalam program sertifikasi tanah bagi masyarakat.

"Apakah itu juga menjadi pembahasan awal berkaitan dengan proses mekanisme pelepasan izin kawasan hutan ya di wilayah Kuansing dalam rangka pemberian sertifikasi kepada pihak-pihak ataupun masyarakat di wilayah Kuansing pada program nasional. Ini juga masih akan terus didalami," ujar Budi.

Sejauh ini, penyidik belum menemukan indikasi adanya pemberian uang pada pertemuan April. Fokus pemeriksaan masih diarahkan pada substansi pembicaraan dan proses awal pengurusan izin.

KPK menduga telah terjadi pemberian uang senilai sekitar SGD12.500 dari pejabat Pemerintah Kabupaten Kuansing kepada seorang pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Dugaan itu diperoleh dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi.

"Diduga ada pemberian lainnya yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing kepada pihak-pihak di Kementerian Kehutanan. Dugaan pemberian itu dilakukan sebelumnya, yaitu sekitar Mei, sejumlah sekitar SGD12.500," kata Budi.

Namun, KPK belum membuka identitas pejabat penerima uang



Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (tengah)

tersebut. Penyidik masih menguji seluruh keterangan saksi untuk memastikan pihak yang menerima serta kaitannya dengan proses pelepasan kawasan hutan.

Berbeda dengan uang yang diduga diterima Raja Juli dan disebut telah dikembalikan, Budi mengatakan hingga kini belum ada pengembalian atas uang SGD12.500 yang diduga diterima pejabat Kementerian Kehutanan pada Mei.

"Informasi yang kami dapatkan dari penyidik, dari pemeriksaan kepada sejumlah saksi bahwa pemberian yang dilakukan pada Mei 2026 belum dilakukan pengembalian," ujarnya.

Puncak perkara yang sejauh ini telah dikonfirmasi secara terbuka adalah pertemuan pada 2 Juni 2026.

Dalam konstruksi penyidikan KPK, Suhardiman diduga menyerahkan amplop berisi SGD14.000 kepada Raja Juli Antoni setelah audiensi di Kementerian Kehutanan. "Dan di bulan Juni, yang kemudian sudah dikonfirmasi secara terbuka oleh Pak Menteri, adanya pemberian dari pihak Pak Bupati kepada Pak Menteri pada awal Juni, tepatnya 2 Juni," kata Budi.

Tak Utuh Dikembalikan

Meski demikian, penyidik menemukan persoalan baru setelah menelusuri proses pengembalian uang tersebut.

KPK sebelumnya menyatakan Raja Juli telah mengembalikan uang kepada Suhardiman. Namun hasil pemeriksaan sementara menunjukkan nominal yang dikembalikan belum utuh sebesar SGD14.000.

"Namun pengembaliannya sampai saat ini masih terus dilakukan pengecekan karena memang penyidik mendapati bahwa pengembaliannya belum utuh senilai 14.000 Singapore Dollar," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/8/2026).

Selisih uang yang belum dikembalikan itu kini menjadi bagian dari materi penyidikan.

Untuk menelusuri aliran dana tersebut, KPK telah memanggil sejumlah saksi, termasuk Asisten Bupati Kuansing serta Ketua DPRD Kuansing yang juga menjabat Ketua KUD, Juprizal.

Menurut Budi, kedua saksi diduga mengetahui rangkaian proses mulai dari pengumpulan uang, penyerahan kepada pihak Kementerian Kehutanan, hingga upaya pengembalian.

"Beberapa pihak sudah dilakukan pemanggilan, di antaranya asisten bupati, kemudian Ketua DPRD yang sekaligus juga merupakan Ketua KUD (Juprizal). Di mana kedua pihak ini juga diduga mengetahui mulai dari proses pengumpulan sampai dengan proses dugaan pemberian kepada pihak Kemenhut dan juga proses pengembalian," paparnya.

Dalam konstruksi perkara yang dipaparkan KPK, dugaan suap itu berawal dari pengumpulan dana yang dilakukan oleh Bupati Kuansing.

Penyidik menduga Suhardiman menghimpun uang dari berbagai pihak, mulai dari koperasi unit desa (KUD), kepala desa, hingga camat.

Dana tersebut kemudian dikonversi ke mata uang dolar Singapura dengan total sekitar SGD46.500.

Menurut KPK, uang itu diduga

FAKTA TERSEKUTNYA RAJA JULI DI KASUS BUPATI KUANSING

1. Perkara

- Dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kuansing, Riau.
- Suap diduga untuk memuluskan pelepasan kawasan hutan di Kementerian Kehutanan.

2. Rangkaian Dugaan

- **April 2026:** Pertemuan awal, belum ada dugaan pemberian uang.
- **Mei 2026:** KPK menduga ada pemberian SGD12.500 kepada pejabat Kementerian Kehutanan.
- **2 Juni 2026:** KPK menduga Bupati Kuansing menyerahkan amplop berisi SGD14.000 kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

3. Dugaan Dana

- Dana sekitar SGD46.500 dihimpun dari KUD, kepala desa, dan camat.
- Diduga digunakan untuk mengurus pelepasan HPT.

4. Temuan KPK

- Dugaan pemberian kepada Raja Juli bukan yang pertama.
- Pengembalian SGD14.000 diduga belum utuh.

5. Versi Raja Juli

- Mengaku pertemuan berlangsung resmi di Kementerian.
- Mengaku tidak mengetahui isi amplop.
- Mengaku langsung memerintahkan ajudan mengembalikan amplop, yang dikembalikan pada 12 Juni 2026.

disiapkan untuk memperlancar proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kuansing. Keputusan mengenai pelepasan kawasan tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.

"Artinya, ini juga mengonfirmasi bahwa pemberian dari pihak Pemkab Kuansing kepada pihak-pihak di Kementerian Kehutanan berkaitan dengan pelepasan izin kawasan hutan, bahwa pemberian yang dilakukan oleh pihak bupati kepada Pak Menteri itu bukan pemberian yang pertama. Artinya, ada pemberian sebelumnya," tegas Budi. (wid,ist,med/dya)